

## **PENGEMBANGAN LEMBAGA UNIT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BAHAN OLAH KARET DI SUMATRA SELATAN**

*Development of Institution for Processing and Marketing Units of Raw Rubber Materials in South Sumatra*

Aprizal ALAMSYAH<sup>1\*</sup>, Lala M. KOLOPAKING<sup>2</sup>, dan Djuara P. LUBIS<sup>2</sup>

<sup>1\*</sup>Mahasiswa Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pasca Sarjana, IPB University, Bogor, 16680

<sup>2</sup>Staf Pengajar Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University, Bogor, 16680

\*Email: [aprizal\\_alamsyah@puslitkaret.co.id](mailto:aprizal_alamsyah@puslitkaret.co.id)

Diterima: 20 Juni 2023 / Disetujui: 29 Juli 2023

### **Abstract**

*The existence of processing and marketing units of raw rubber materials (UPPB) in the central areas of rubber smallholders will significantly support the improvement of rubber processing material quality at the farmer level and provide a bargaining position. The purpose of this research is to identify the response of the rubber peasant community to the four institutional components (systems of norms, personnel, physical equipment, and patterned behaviour), find out the institutional components that affect the institutionalization systems of norm UPPB, and analyze the dynamics of institutionalization related to the development of the UPPB among rubber smallholders. This study uses the constructivism paradigm to reveal the social reality of the community under study. Data collection techniques include observation of UPPB activities, in-depth interviews with rubber peasants and stakeholders by means of purposive sampling, focus discussions, and documentation. This research used qualitative data processing techniques, triangulation methods, and inductive analysis. The results of this research indicate that the rubber peasant community did not respond positively to the existence of the UPPB, the individual component has more influence on the response to the institutionalization, and UPPB development failed. The development of UPPB requires the*

*commitment of the parties to guarantee the increase in human resource capacity of rubber smallholders and the stability of the high price share received through UPPB through sustainable stakeholder collaboration.*

*Keywords: institutionalization; raw rubber material; rubber peasant communities; UPPB*

### **Abstrak**

Keberadaan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan olah karet rakyat (UPPB) di wilayah sentra produksi karet rakyat akan sangat mendukung peningkatan mutu bahan olah karet rakyat (bokar) di tingkat petani dan memberikan posisi tawar harga yang tinggi kepada petani. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi respons petani karet terhadap empat komponen lembaga (sistem norma, personel, peralatan fisik, dan kelakuan berpola), mengetahui komponen kelembagaan yang memengaruhi pelebagaan sistem norma UPPB, dan menganalisis dinamika kelembagaan terkait perkembangan UPPB di kalangan petani karet. Kajian ini menggunakan paradigma konstruktivisme untuk mengungkap realitas sosial masyarakat yang diteliti. Teknik pengumpulan data meliputi observasi kegiatan UPPB, wawancara mendalam dengan petani karet rakyat dan para stakeholder dengan cara *purposive*

*sampling*, diskusi terfokus, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data kualitatif, triangulasi, dan analisis induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa petani karet tidak memberikan respons positif terhadap keberadaan UPPB, komponen personel lebih berpengaruh terhadap respons kelembagaan, dan pengembangan UPPB mengalami kegagalan. Pengembangan UPPB membutuhkan komitmen para pihak untuk menjamin peningkatan kapasitas sumber daya petani karet dan stabilitas bagian harga tinggi yang diterima UPPB melalui kolaborasi pemangku kepentingan yang berkelanjutan.

Kata kunci: bokar; kelembagaan; petani karet rakyat; UPPB

## PENDAHULUAN

Karet alam sebagai salah satu komoditas unggulan strategis yang memberikan devisa bagi negara dari sektor non-migas masih didominasi oleh penguasaan lahan kebun karet milik petani karet swadaya. Saat ini, industri perkaretan mengalami kondisi yang memprihatinkan dikarenakan produktivitas kebun yang rendah akibat serangan penyakit gugur daun *Pestalotiopsis* dan ditambah lagi ketidakstabilan harga yang relatif rendah. Yuningtyas et al. (2019) menyatakan bahwa terdapat integrasi pasar karet alam dunia dengan pasar karet alam domestik, dimana Indonesia selaku negara eksportir sangat bergantung pada kondisi pasar karet alam dunia. Selain itu, hubungan positif yang signifikan terjadi antara harga ekspor dan produksi di beberapa negara ASEAN, maka Indonesia selaku produsen terbesar kedua setelah Thailand akan mengalami tren produksi bahan olah karet atau bokar menurun di masa mendatang (Khin et al., 2018).

Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet disingkat UPPB mulai dibentuk sejak berlakunya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 38 Tahun 2008 dan hingga kini masih terus dikembangkan untuk mengatasi tantangan

perbaikan mutu karet alam dan peningkatan produktivitas perkebunan karet rakyat yang tersebar di Indonesia, khususnya Sumatra Selatan selaku sentra terbesar perkebunan karet. Permasalahan bagian harga yang diterima oleh petani mulai teratasi dengan dibentuknya UPPB (Alamsyah et al., 2017; Agustina et al., 2017). Pemasaran terorganisir mampu meningkatkan pendapatan petani karet dan rata-rata bagian harga yang diterima petani adalah 80% dari harga *free on board* (FOB) dan 50-58% dari harga FOB untuk pemasaran bokar tradisional (Nugraha dan Alamsyah, 2019a). Namun, kesejahteraan petani karet secara menyeluruh belum sepenuhnya membaik, dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi petani karet (Syarifa et al., 2016; Antoni dan Tokuda, 2019; Nugraha dan Alamsyah, 2019b). Keberlanjutan agenda gerakan nasional bokar bersih dianggap belum optimal. Sinergi pemerintah sangat diperlukan agar berperan aktif memfasilitasi strategi kerja sama multi-pihak berdasarkan prinsip bisnis legal dalam pembangunan ekonomi desa (Meilandi et al., 2020). Berdasarkan evaluasi gerakan bokar bersih di Provinsi Jambi pada tahun 2022, pembentukan UPPB dalam lima tahun terakhir telah mencapai 759 UPPB yang terdaftar, akan tetapi hal ini belum cukup untuk meningkatkan kualitas mutu bokar petani yang masih rendah dengan kadar karet kering (KKK) 50-60% dan produktivitas kebun karet hanya 1 ton/ha/tahun (Dirjenbun, 2022). Pengembangan UPPB sepatutnya diikuti pemahaman proses sistem internalisasi komponen-komponen lembaga, sehingga adaptasi perilaku di kalangan komunitas petani karet terlegitimasi sebagai suatu sistem yang mendukung pola interaksi sosial ideal sehubungan dengan proses kelembagaan UPPB. Koentjaraningrat (2000) menggambarkan komponen-komponen lembaga yang eksis sebagai unsur yang saling berhubungan dan mengikat pada suatu sistem untuk mencapai tujuan, antara lain adanya sistem norma, personel, peralatan fisik, dan kelakuan berpola. Kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani dengan mempertahankan fungsi kelompok tani, peningkatan kapasitas anggota melalui pendidikan, dan pelatihan (Effendy dan Mustofa, 2020).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi respons komunitas petani karet terhadap komponen-komponen kelembagaan, mengetahui komponen kelembagaan yang memengaruhi kelembagaan UPPB, dan menganalisis dinamika pelebagaan terkait pengembangan UPPB di kalangan komunitas petani karet dapat berlangsung ideal, serta mensejahterakan rumah tangga petani karet dalam membangun kawasan sentra ekonomi di pedesaan. Oleh karena itu, pelebagaan UPPB perlu diketahui terjemahannya secara komprehensif agar dapat memastikan capaian tujuan bersama yang menjadi harapan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Permasalahan terkait UPPB menarik untuk diteliti terkait proses pelebagaan dalam pengembangan sentra perkebunan karet yang dapat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan program karet berkelanjutan.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan paradigma konstruktivisme untuk mengungkap realitas sosial yang diteliti (Ritzer, 2012). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan. Hal ini dikarenakan tingginya partisipasi komunitas petani karet dan penumbuhan UPPB yang lebih banyak serta aktif dalam program pengembangan UPPB. Subjek penelitian ini adalah anggota atau pengurus UPPB dan unsur pemerintah dan *stakeholder* lain (NGO dan tokoh masyarakat) yang memiliki pengalaman dan terlibat dalam pelebagaan UPPB. Penelitian berlangsung pada bulan April sampai dengan Agustus 2021.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari subjek penelitian sebagai informan, partisipan, dan narasumber dengan kriteria kesediaan informan serta memiliki pengetahuan dan pengalaman objektif tentang UPPB. Data sekunder

berupa dokumen dan manuskrip sehubungan pengembangan UPPB di kalangan komunitas petani karet. Teknik pengumpulan data dengan cara *purposive sampling*, instrumen penelitian ini meliputi observasi di lapangan, wawancara mendalam narasumber, dokumentasi, dan diskusi terfokus. Pendekatan triangulasi digunakan untuk menguji kredibilitas data dan sumber data, menggabungkan serta mengecek berbagai data dan sumber data dengan membandingkan hasil wawancara, pengamatan di lapangan dan dokumen lain. Analisis data meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Respons Petani Karet terhadap Pelebagaan UPPB**

UPPB sebagai satuan usaha atau unit usaha yang dibentuk oleh dua atau lebih kelompok petani serta sebagai tempat penyelenggaraan bimbingan teknis, pengolahan, dan pemasaran bokr. Salah satu tugas UPPB yaitu menjalankan fungsi kelembagaan pemasaran untuk memperoleh bagian harga yang lebih menguntungkan petani karet, meskipun begitu hal ini tidak selalu disikapi positif oleh sebagian besar petani di komunitas karet. Terdapat 413 UPPB yang tersebar di Sumatra Selatan, pengembangan UPPB yang tampak aktif berada di Kabupaten Banyuasin sejumlah 77 UPPB dengan produksi 2.350 ton/bulan dan di Musi Banyuasin sejumlah 122 UPPB dengan produksi 3.255 ton/bulan.

Total luas areal yang termasuk dalam kelompok UPPB di Sumatra Selatan saat ini seluas 92 ribu hektar atau 11% dari total luas areal karet rakyat yang mencapai 847 ribu hektar. Selain itu, hanya 12% petani karet (46 ribu orang) yang tercatat sebagai anggota UPPB. Angka tersebut masih sangat jauh jika dibandingkan dengan total jumlah petani karet yang mencapai 387 ribu kepala

Tabel 1. Rekapitulasi sepuluh besar data sebaran UPPB di Sumatra Selatan  
 Table 1. Recapitulation of the top ten UPPB distribution data in South Sumatra

No	Kabupaten/ Kota Regency/ City	Jumlah UPPB Number of UPPB	Jumlah anggota Number of members	Luas (ha) Area (ha)	Produksi (ton/bulan) Production (tonnes/ month)	Total perkebunan rakyat Total of smallholders		% Coverage UPPB	
						Luas (ha) Area (ha)	Petani (KK) Farmer (head of family)	Luas (ha) Area (ha)	Petani (kk) Farmer (head of family)
1	Musi Banyuasin	122	15.244	28.091	3.254	135.834	54.303	21	28
2	Banyuasin	77	9.834	13.308	2.349	72.730	31.206	18	32
3	Muara Enim	57	5.638	6.907	1.468	96.056	51.573	7	11
4	OKU	29	3.427	6.751	1.787	44.633	22.372	15	15
5	Musi Rawas	24	1.654	7.161	715	89.359	42.630	8	4
6	Ogan Ilir	22	1.955	3.445	537	24.767	19.249	14	10
7	OKI	20	1.421	7.174	963	112.742	44.913	6	3
8	PALI	16	1.041	1.789	387	45.092	27.490	4	4
9	OKU Timur	14	2.890	10.122	3.284	57.697	29.472	18	10
10	Lahat	10	652	1.934	178	22.757	17.153	8	4

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (data diolah, 2023)

keluarga. Sementara itu, jumlah anggota UPPB cukup tinggi di Kabupaten Banyuasin sebesar 32% dan 28% di Musi Banyuasin. Data menunjukkan partisipasi petani di komunitas karet pada dua lokasi tersebut lebih tinggi dibandingkan wilayah lain yang mencakup areal 18-20% dari total luas areal kebun karet rakyat di masing-masing lokasi (Tabel 1).

Fakta bahwa petani karet yang menjadi anggota UPPB di wilayah Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin cukup banyak, namun tidak menjadi tolak ukur bahwa UPPB mendapatkan respons positif di dua lokasi penelitian. Petani yang aktif di UPPB diwajibkan untuk mengikuti aturan bokar bersih dan ketentuan yang ditetapkan pengurus UPPB. UPPB menjamin ketersediaan pasokan bokar dengan mutu baik melalui proses pemasaran bokar terorganisir karena didukung oleh peran aktif pengurus. Komunitas petani karet yang belum bergabung beranggapan bahwa kelembagaan UPPB tidak mengakomodir potensi dan kepentingan komunitas petani karet sebagai modal untuk melakukan aksi kolektif. Bahkan UPPB dinilai terbentuk untuk realisasi formalitas program *top-down* pemerintah pada momentum tertentu saja, seperti pendistribusian sarana produksi (saprodi) dan pertemuan teknis yang lebih bersifat seremonial.

Alasan di kalangan petani karet yang belum merespons positif adanya UPPB di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin, antara lain:

1. UPPB pada umumnya dibentuk berdasarkan kepentingan teknis bersifat orientasi program, belum cukup mampu memberikan jaminan kemandirian komunitas petani karet sehingga sistem norma yang menjadi unsur penting dalam pelembagaan UPPB tidak menyentuh kesadaran petani untuk menjalankannya secara menyeluruh.
2. UPPB dihadapkan pada masalah permodalan, ketidakstabilan harga, dan akses pemasaran yang terbatas. Meskipun UPPB sudah dibentuk, pembinaan yang dijalankan cenderung tidak mengajarkan bagaimana meningkatkan kinerja komunitas secara kolektif dan inklusif, karena tidak ada pendampingan *social learning approach* yang berkelanjutan.
3. Pengembangan lembaga UPPB tidak menggunakan basis *social capital* setempat dengan prinsip kemandirian lokal. Terdapat keterbatasan akses bagi UPPB untuk bersaing dalam mekanisme pasar yang lebih luas. Pelembagaan UPPB secara *top-down* kurang memperhatikan proses terkait komponen-komponen lembaga yang sepatutnya membutuhkan peran multipihak untuk saling mendukung.

Pengembangan kelembagaan UPPB selalu menggunakan jalur struktural berbasis program tanpa monitoring dan evaluasi komponen-komponen lembaga. *Social institutionalization* dapat dipastikan tidak dipahami oleh sebagian besar anggota UPPB dan bahkan di level penyuluh pertanian. Struktur organisasi dibangun lebih dahulu, namun tidak diikuti oleh peningkatan kapasitas sumber daya untuk capaian dan target program pengembangan komunitas karet.

Di sisi lain komunitas petani karet tidak merespons positif adanya kelembagaan UPPB dikarenakan beberapa hal, antara lain:

1. Keberadaan kebun karet rakyat tersebar dan jarak kebun ke pabrik karet tergolong jauh. Jauhnya lokasi pabrik tidak diiringi dengan fasilitas pendukung sarana produksi dan transportasi yang memadai.
2. Petani masih menjual bokar berdasarkan atas berat basah. Terkadang petani mencampur kontaminan seperti tanah, pasir, tatal, dan lainnya. Keterikatan

Tabel 2. Tahapan dan personal dalam pelebagaan UPPB di komunitas petani karet  
 Table 2. Stages and personnel in institutionalizing the UPPB in the rubber farming community

No	Tahapan Stages	Kabupaten Banyuasin <i>Banyuasin Regency</i>				Kabupaten Musi Banyuasin <i>Musi Banyuasin Regency</i>			
		Personel <i>Personnel</i>				Personel <i>Personnel</i>			
		P	PD	NG	ST	P	PD	NG	ST
1.	<i>Diketahui sebagai aturan sosial. Norma dan perilaku baru disepakati bersama</i>	√	√	×	√×	√	√	√×	√×
2.	<i>Dipahami fungsi lembaga sosial. Norma dan perilaku baru dan diuji-cobakan</i>	√	√	×	√×	√	√	√×	√×
3.	<i>Dihargai dengan sikap dan perilaku selaras dengan aturan sosial. Norma dan perilaku baru bermanfaat dan dilegitimasi</i>	√	√	×	√×	√	√	√×	√×
4.	<i>Ditaati sebagai penghargaan atas manfaat aturan sosial. Norma dan perilaku tidak dilanggar sebaliknya menjaga ketertiban</i>	√×	√×	×	×	√×	√	√×	√×
5.	<i>Diterima dan terinternalisasi secara utuh dengan sikap dan tindakan. Norma sosial berlaku dihayati dan mandarah-daging</i>	√×	√×	×	×	√×	√	×	√×

Keterangan:

P = petani, PD = pemerintah/dinas perkebunan, NG = *non-government organization*, ST = *stakeholder* dan tokoh masyarakat, √ = dilakukan, × = tidak dilakukan, √× = sebagian dilakukan dan sebagian tidak dilakukan.

Remarks:

P = *farmers*, PD = *government/plantation agency*, NG = *non-government organization*, ST = *stakeholders and community leaders*, √ = *done*, × = *not done*, √× = *some done and some not done*.

petani dengan pedagang perantara sehingga bokar tidak harus dijual melalui UPPB.

3. Peraturan yang berlaku seringkali tidak dijalankan dan pemberian sanksi hanya membuat anggota UPPB menjadi tidak aktif dalam pemasaran bokar melalui lelang.

Fenomena yang masih terjadi dalam pemasaran bokar adalah adanya keterikatan yang kuat antara petani dengan pedagang pengumpul tingkat desa yang bertindak sebagai tengkulak. Keberadaan tengkulak bagi sebagian petani merupakan dewa penyelamat yang sewaktu-waktu dapat memberikan bantuan modal atau

kebutuhan yang mendesak tanpa melalui prosedur atau aturan seperti yang berlaku di UPPB. Padahal dengan adanya rasa hutang budi ini, petani cenderung terikat secara moral sehingga tidak memiliki kekuatan tawar dan selalu menjadi *price taker*, hal ini tentu merugikan petani. Berbagai kemudahan yang diberikan oleh pedagang pengumpul menjadi salah satu penyebab

sulitnya petani bergabung dengan UPPB dengan segala aturan yang harus diikuti oleh petani. Insentif kemudahan tersebut ternyata lebih memiliki daya tarik dari pada fakta keuntungan ekonomi yang dapat diberikan oleh UPPB sebagai lembaga pemasaran yang terorganisasi secara formal.

Table 3. Matriks komponen-komponen lembaga dan respons pelebagaan UPPB  
Table 3. Matrix of institutional components and UPPB institutional responses

Komponen/ unsur <i>Components/ elements</i>	Pelebagaan UPPB <i>UPPB institutionalization</i>		Hasil <i>Results</i>
	Sebelum <i>Before</i>	Setelah <i>After</i>	
Sistem Norma	Pemasaran tradisional, tidak ada aturan bokar bersih, adopsi teknologi tidak penting.	Lelang bokar, panduan /pedoman mutu bokar, pemberlakuan aturan dan sanksi.	Tahapan sampai pada diterima, pelaporan dan pendokumentasian data mempertahankan eksistensi
Personel	Sub-sistem, apatis, kepentingan ( <i>temporary</i> ). Tidak ada aktor pendukung ( <i>role model</i> ). Pedagang perantara/ tengkulak eksis.	Partisipatif, dalam program pemberdayaan petani. Peran tokoh/para aktor pendukung, petani teladan berkarakter <i>visioner</i> .	Pada tahap dihargai, merasakan manfaat. Konsisten menjaga mutu bokar dan memiliki <i>bargaining position</i> .
Peralatan Fisik	Minim sarana-prasarana, peralatan seadanya. Distribusi saprodi dan alsin tidak tepat sasaran.	Modern, daya dukung fasilitas dan teknologi tepat guna, distribusi saprodi dan alsin yang tepat sasaran.	Transfer teknologi, adopsi inovasi petani. Tahap dihargai karena merasakan manfaat.
Kelakuan Berpola	Budidaya karet konvensional, tidak menjaga mutu bokar, ketergantungan tengkulak.	Budidaya karet terpola sesuai rekomendasi, pemasaran terorganisir, mekanisme rapat anggota.	Menjalankan sistem norma (diterima), rutinitas petani karet terstruktur dan sistematis.

Berdasarkan analisis unsur atau komponen-komponen lembaga yang membentuk suatu lembaga sosial atau UPPB di komunitas petani karet di Banyuasin dan Musi Banyuasin, maka pada Tabel 3 menjelaskan bahwa hubungan yang mengikat individu petani/kelompok terkait pelebagaan UPPB didasari oleh saling

keterkaitan sistem norma, personel, peralatan fisik, dan kelakuan berpola. Secara normatif, pelebagaan UPPB dapat dinyatakan belum mencapai fase terinternalisasi secara menyeluruh di kalangan komunitas petani karet. Meskipun sistem norma sudah diterima, namun faktanya tidak semua petani menaati aturan

yang ditetapkan. Komunitas sebagai personel dalam hal ini petani karet telah merasakan manfaat dengan menaati norma yang sesuai dengan hasil yang diinginkan, suatu pengakuan atau legitimasi hanya bagi UPPB dengan kapasitas SDM yang unggul. Dukungan sarana berupa inovasi teknologi atau peralatan fisik sangat membantu komunitas petani UPPB, sekalipun tidak semua memanfaatkan peralatan fisik karena keterbatasan akses dan permodalan. Hal tersebut dirasakan oleh sebagian besar petani yang merespons negatif keberadaan UPPB ditandai dengan rendahnya partisipasi petani karet untuk menjadi anggota UPPB. Sementara UPPB yang berhasil menerima keseluruhan komponen lembaga menjalankan keteraturan sistem norma yang ideal secara mandiri. Respons negatif petani karet yang tidak menerima kesatuan komponen dalam suatu sistem norma di UPPB, yaitu tidak konsisten dan kebiasaan turun-temurun cenderung tradisional masih dipertahankan di kalangan petani karet.

Pada pola pemasaran tradisional, petani menjual bokar kepada pedagang pengumpul, sedangkan pola pemasaran terorganisir dilakukan dengan cara sistem lelang melalui UPPB. Keputusan petani memilih pola pemasaran didasari selisih harga yang diterima dari proses tersebut akan menguntungkan petani. Apabila ini terjadi maka dapat dipastikan petani akan merespon positif terhadap UPPB. Pada kenyataannya keputusan petani untuk memilih pola pemasaran tradisional adalah ilusi balas jasa (*patron client*), pada saat petani merasa terdesak tuntutan ekonomi dan membutuhkan pertolongan, maka pedagang pengumpul hadir untuk mereka. Selain itu, petani juga masih beranggapan dengan cara mencampurkan kontaminan atau benda asing selain bokar dapat menambah bobot berat agar memperoleh penerimaan yang lebih besar. Padahal peran UPPB menjembatani pemasaran bokar untuk menjalankan fungsi lembaga ekonomi di pedesaan.

Kualitas mutu bokar yang baik layak untuk dihargai secara proposional, maka dari itu penting bagi petani karet terlibat dalam pemasaran terorganisir melalui fungsi lembaga UPPB. Respons komunitas

petani karet yang cenderung tidak aktif dalam kegiatan UPPB dikarenakan berbagai hal yang mendasari pemikiran dan sikap petani untuk tidak peduli dengan berbagai alasan.

### **Dinamika Komunitas Petani Karet Terkait Penumbuhan dan Penguatan UPPB**

Kelembagaan UPPB secara tidak langsung sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan produktivitas usaha tani karet dan memperoleh bagian harga yang tinggi. UPPB sebagai sarana membangun kerja sama antar komunitas petani. Adanya UPPB di kalangan komunitas petani karet menjadi solusi permasalahan dalam peningkatan mutu melalui pemasaran bersama lelang bokar UPPB. Kelembagaan UPPB sebagai tempat antar anggota petani karet mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat petani di pedesaan, sebab segala bentuk kegiatan dan permasalahan dalam usaha tani karet dilakukan UPPB secara kolektif dan inklusif.

Dinamika penumbuhan dan penguatan UPPB merupakan keseluruhan perubahan dari seluruh komponen komunitas petani karet di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin dari waktu ke waktu. Kolektivitas petani karet terkait fase dan dinamika penumbuhan dan penguatan UPPB didasari oleh hubungan interaksi sosial yang mendorong pada suatu gerak keseluruhan komponen lembaga di komunitas petani karet ke arah perubahan. Berdasarkan analisa terkait fase, dimensi, dan dinamika pelembagaan UPPB di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin (Tabel 4), maka dapat diartikan bahwa pelembagaan UPPB di kalangan komunitas petani karet sudah sampai pada fase diterima dan terinternalisasi, namun belum dapat dipastikan secara menyeluruh. Hal tersebut dikarenakan masih banyak petani karet yang tidak peduli akan tujuan pelembagaan UPPB.

Tahapan pelembagaan UPPB yang ideal mengharuskan adanya hubungan komponen unsur yang berhubungan satu sama lain dan mengikat. Semakin harmonis interaksi antar unsur dalam kesatuan proses pelembagaan yang telah sampai pada

Tabel 4. Fase, dimensi, dan dinamika pelebagaan UPPB  
 Table 4. Phases, dimensions, and dynamics of UPPB institutionalization

Tahapan Stages	Dimensi Dimensions	Dinamika Pelebagaan UPPB <i>Dynamics of UPPB institutionalization</i>	
		Kabupaten Banyuasin <i>Banyuasin Regency</i>	Kabupaten Musi Banyuasin <i>Musi Banyuasin Regency</i>
Mengenal (diketahui)	Petani/Komunitas	Mengetahui komponen sistem norma di UPPB	Mengetahui komponen sistem norma di UPPB
	Pemerintah	Mengetahui komponen sistem norma di UPPB	Mengetahui komponen sistem norma di UPPB
	Stakeholder	Tidak mengetahui komponen sistem norma di UPPB	Sebagian mengetahui dan sebagian tidak mengetahui
Memahami (dipahami)	Petani/Komunitas	Memahami manfaat UPPB	Memahami manfaat UPPB
	Pemerintah	Memahami manfaat UPPB	Memahami manfaat UPPB
	Stakeholder	Tidak memahami komponen sistem norma di UPPB	Memahami manfaat UPPB
Menghargai (dihargai)	Petani/Komunitas	Menghargai sistem norma, sebagian tidak menghargai	Menghargai sistem norma, sebagian tidak menghargai
	Pemerintah	Menghargai sistem norma, sebagian tidak menghargai	Menghargai sistem norma, sebagian tidak menghargai
	Stakeholder	Tidak menghargai komponen sistem norma	Tidak menghargai komponen sistem norma
Menaati (ditaati)	Petani/Komunitas	Tidak menaati dan sebagian menaati sistem norma	Tidak menaati dan sebagian menaati sistem norma
	Pemerintah	Tidak menaati dan sebagian menaati sistem norma	Tidak menaati dan sebagian menaati sistem norma
	Stakeholder	Tidak menaati dan sebagian menaati sistem norma	Tidak menaati dan sebagian menaati sistem norma
Menerima (diterima)	Petani/Komunitas	Menerima komponen sistem norma dan sebagian tidak menerima komponen sistem norma	Menerima komponen sistem norma dan sebagian tidak menerima komponen sistem norma
	Pemerintah	Menerima komponen sistem norma dan sebagian tidak menerima komponen sistem norma	Menerima komponen sistem norma dan sebagian tidak menerima komponen sistem norma
	Stakeholder	Tidak menerima komponen sistem norma	Menerima komponen sistem norma dan sebagian tidak menerima sistem norma

fase diterima, maka semakin besar kelembagaan UPPB mencapai tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok anggota UPPB.

Uraian pada Tabel 4 juga menjelaskan bahwa terkait dinamika kelembagaan UPPB, diperlukan upaya transfer ilmu dan teknologi untuk memastikan fase diterima dalam kelembagaan UPPB di komunitas petani karet berlangsung sesuai dengan hubungan

yang mengikat satu sama lain antar komponen lembaga. Oleh karena itu, para pihak harus menyadari tujuan akan kepentingan yang sama terkait kelembagaan UPPB bagi kesejahteraan petani di sentra-sentra kebun karet rakyat secara merata, sehingga peningkatan kapasitas UPPB dapat mendorong respons positif petani karet di pedesaan, khususnya di dua lokasi penelitian ini.

Tabel 5. Komparasi data UPPB di dua kabupaten dalam kurun waktu tertentu  
 Table 5. Comparison of UPPB data in two districts over a certain period of time

Deskripsi Description	Total keseluruhan UPPB 2023 Overall total UPPB 2023		Rata-rata per UPPB 2021 vs 2023 Average per UPPB 2021 vs 2023			
	Banyuasin	Musi Banyuasin	Banyuasin		Musi Banyuasin	
	UPPB	77	122	70	77	96
Anggota UPPB	9.834	15.244	374	128	412	125
Luas Areal (ha)	13.308	28.091	475	173	641	230
Produksi Bokar (ton/bulan)	2.349	3.254	69	31	35	27
Cakupan Petani Karet (%)	32	28	Na	Na	Na	Na
Petani Pengurus UPPB	++	+++	Na	Na	Na	Na
Petani Anggota UPPB	++	+++	Na	Na	Na	Na

Keterangan: + = rendah, ++ = sedang, +++ = tinggi

Remarks: + = low, ++ = moderate, +++ = high

Berdasarkan data eksistensi UPPB di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin saat ini menunjukkan bahwa telah terjadi penumbuhan UPPB yang meningkat dari tahun 2021 dan tahun 2023 di dua lokasi penelitian. Akan tetapi, tidak diikuti dengan perubahan rata-rata cakupan jumlah anggota UPPB, luas areal, dan produksi bokar per bulan. Komparasi data UPPB pada Tabel 5 membandingkan data UPPB di tahun 2021 dan tahun 2023, dimana telah terjadi penurunan rata-rata jumlah anggota UPPB, cakupan luas, dan produksi di masing-masing kabupaten tersebut. Hal ini

memperkuat analisa bahwa dinamika pengembangan kelembagaan UPPB di dua lokasi mendapat respons negatif di sebagian besar komunitas petani karet. Pada akhirnya, terdapat kategori UPPB yang aktif dan pasif menerima sistem norma dan membudayakan perilaku berpola sesuai harapan (Tabel 6). Pelembagaan UPPB mengalami tantangan berat dan sudah seharusnya dievaluasi. Perlunya rencana aksi program yang tepat terkait penumbuhan dan penguatan UPPB agar dapat diterima di komunitas petani karet secara merata dan berkelanjutan.

Tabel 6. Pengkategorian UPPB terkait komponen-komponen lembaga  
 Table 6. UPPB categorization related to institutional components

Tipologi <i>Typology</i>	Sistem norma <i>Norm system</i>	Personel <i>Personnel</i>	Peralatan fisik <i>Physical equipment</i>	Kelakuan berpola <i>Patterned behavior</i>
UPPB Aktif	Tinggi penghargaan dan sanksi. Transparansi pelaporan.	<i>Leadership</i> , komunikatif menjaga konektivitas para pihak.	Upaya pemenuhan kebutuhan sarana produksi dan pemanfaatan fasilitas secara kontinu.	Mempertahankan sesuai sistem norma. Komunikasi yang baik antar para pihak. Pertemuan/rapat rutin. Pendampingan dan pembinaan optimal.
UPPB Pasif	Rendah penghargaan dan sikap kurang disiplin pelaporan.	Keterbatasan pengetahuan dan sikap pengurus, seringkali cepat merasa puas.	Tidak ada pemeliharaan sarana produksi dan kurang pemanfaatan fasilitas pendukung.	Cenderung tidak mempertahankan sistem norma. Pertemuan/rapat seperlunya. Pendampingan dan pembinaan tidak optimal.

### KESIMPULAN

Proses pelebagaan UPPB mengalami kegagalan dikarenakan respons terhadap suatu komponen sistem norma baru tidak sampai pada tahapan diterima. Ketidakterdayaan petani untuk melepaskan diri dari pola pemasaran tradisional. Komponen personel memengaruhi partisipasi sebagian besar petani karet dalam pemasaran bokar di UPPB. Kelakuan berpola yang cenderung bertahan dengan tradisi lama atau pemasaran tradisional. Dinamika pelebagaan UPPB di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin dipengaruhi oleh peran pemerintah, partisipasi petani, inovasi teknologi, kesadaran nilai tambah, kolaborasi, perubahan pasar, dan kapasitas sumber daya manusia. Peran pemerintah dalam kebijakan dan dukungan infrastruktur sangat berpengaruh. Partisipasi aktif petani dan pelaku usaha

karet penting untuk keberlanjutan. Pemanfaatan teknologi modern dan nilai tambah produk juga diperlukan untuk mendukung pengembangan lembaga UPPB.

### SARAN

Perlu upaya perumusan komitmen bersama yang mengikat dalam bentuk kerja sama multi-pihak dalam pelebagaan UPPB secara konkrit dan konsisten. Memfasilitasi komunitas petani karet di pedesaan untuk kemudahan akses modal dan transfer teknologi melalui pendampingan berkala sehubungan pengembangan UPPB di sentra karet rakyat. Kolaborasi *stakeholder* diperlukan untuk menjamin komitmen peningkatan kapasitas UPPB, sumber daya petani karet, dan kestabilan bagian harga yang diterima agar pelebagaan sistem norma baru melalui UPPB dapat diterima.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D. S., Alamsyah, A., & Nugraha, I. S. (2017). Material and farmers' share through the organized marketing system (case study in South Sumatra Province, Indonesia). *Proceedings of International Rubber Conference 2017* (pp. 583-592). Jakarta, Indonesia: Indonesian Rubber Research Institute dan IRRDB.
- Alamsyah, A., Nugraha, I. S., Agustina, D. S., & Vachlepi, A. (2017). Tinjauan penerapan unit pengolahan dan pemasaran bokar untuk mendukung gerakan nasional bokar bersih di Sumatera Selatan. *Warta Per karetan*, 36(2): 159-172.
- Antoni, M., & Tokuda, H. (2019). Identification of obstacles and drivers of smallholder rubber farmer to become members of a processing and marketing unit in Indonesia. *Applied Economics and Finance*, 6(2). RedFame Publishing.
- Dirjenbun. (2022). *Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2021-2023*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Effendy, L., & Mustofa, R. (2020). Model pengembangan kelembagaan petani menuju kelembagaan ekonomi petani di Kecamatan Sindangkasih Ciamis. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(1): 38-47.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2008). Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Khin, A. A., Jacob, J., Teng, K. L. L., Bin, R. L. L & Chau, W. H. (2018). Forecasting technology using for dynamic natural rubber production models in selected asean countries and world market. *Advanced Science Letters*, 24(5): 3368-3373.
- Koentjaraningrat. (2000). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Gramedia. 14-15
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. London: Sage.
- Meilandi, I., Kolopaking, L. M., & Lubis, D. P. (2020). Institutional development strategies for internet provision in digital communities and villages (study in inter-village owned enterprises, Panca Mandala, Tasikmalaya Regency. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 10(1): 159-178.
- Nugraha, I. S., & Alamsyah, A. (2019a). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan petani karet di Desa Sako Suban, Kecamatan Batang Hari Leko, Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 24(2): 93-100.

- Nugraha, I. S., & Alamsyah, A. (2019b). Dampak program pengembangan kebun karet rakyat terhadap tingkat kesejahteraan petani karet di wilayah operasional migas di Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 18(1): 41-50.
- Syarifa, L.F., Agustina, D.S., Alamsyah, A., & Nugraha, I.S. (2016). Potensi dan kendala dalam penguatan dan penumbuhan kelompok pemasaran bahan olah karet terorganisir di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Penelitian Karet*, 34(2): 237-246.
- Ritzer G. 2012. *Teori Sosiologi. Dari Sosiologi klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Edisi kedelapan (terjemahan). Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Yuningtyas, C. V., Hakim, D. B., & Novianti, T. (2019). Integrasi pasar karet alam indonesia dengan pasar dunia. *Jurnal Penelitian Karet*, 37(2): 139-150.